

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Keputusan Jepang membuang limbah nuklir Fukushima pada tahun 2023 berdampak pada hubungannya dengan beberapa negara. Keputusan untuk membuang limbah nuklir Fukushima ini telah menuai berbagai respon dari masyarakat global mulai dari yang mendukung keputusan tersebut hingga beberapa pihak yang menentang keras pembuangan limbah nuklir Fukushima tahun 2023. Tiongkok menyatakan penolakan tegas terhadap pembuangan limbah nuklir Fukushima tersebut. Tiongkok menganggap Jepang telah berlaku egois dan tidak memikirkan keamanan lingkungan. Tiongkok menyebutkan bahwa Jepang hanya memikirkan kepentingan negaranya dan tanpa berdiskusi dengan negara lain langsung memutuskan pembuangan limbah nuklir tersebut.

Sebagai bentuk tegas terhadap penolakan pembuangan limbah nuklir tersebut, Tiongkok dengan segera mengeluarkan sebuah kebijakan. Pada Agustus 2023 Tiongkok memberlakukan kebijakan larangan impor produk laut dari Jepang. Langkah ini dipilih Tiongkok sebagai bentuk tanggungjawabnya sebagai negara untuk melindungi keamanan pangan masyarakat. Tiongkok bahkan melakukan larangan penuh terhadap semua produk laut milik Jepang yang masuk ke negaranya termasuk garam laut dan rumput laut.

Kebijakan ini memberikan pukulan bagi Jepang. Jepang sebelumnya sudah harus menghadapi dampak sosial dari pembuangan limbah nuklir Fukushima. Pembuangan limbah nuklir ini membuat masyarakat marah dan hilangnya rasa

percaya terhadap Jepang yang dikenal sebagai negara ramah lingkungan. Kemudian larangan Tiongkok dalam kegiatan ekspor impor ini memberikan hambatan baru bagi Jepang khususnya di sektor ekonomi. Tiongkok merupakan negara tujuan ekspor utama produk laut Jepang sejak tahun 2022. Jepang segera menyusun langkah-langkah strategis untuk menangani permasalahan ini. Untuk merespon kebijakan Tiongkok ini, Jepang mengedepankan diplomasi ekonomi agar dapat membujuk Tiongkok untuk berdiskusi dan mencabut kebijakan larangan impor tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini telah menganalisis strategi-strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Jepang dalam menghadapi kebijakan larangan impor produk laut oleh Tiongkok tahun 2023.

Untuk menganalisis strategi-strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Jepang, peneliti menggunakan kerangka konsep diplomasi ekonomi oleh Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock. Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock dalam bukunya *The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations* edisi pertama tahun 2003 menyebutkan terdapat empat strategi yang dilakukan oleh negara untuk memaksimalkan diplomasi ekonomi. Empat strategi tersebut adalah *involving ministers*, *bringing in non-state actors*, *greater transparency* dan *using institutions*. Keempat indikator ini digunakan untuk menganalisis strategi-strategi yang dilakukan oleh Jepang dalam menghadapi kebijakan larangan impor produk laut oleh Tiongkok.

Pada strategi *involving ministers*, Jepang memaksimalkan peran para Menteri untuk melakukan diplomasi ekonomi. Menteri yang memiliki peran signifikan dalam penyelesaian masalah ini adalah Menteri Luar Negeri Jepang. Menteri Luar Negeri Jepang ini menghadapi beberapa agenda pertemuan di forum

internasional dan mengangkat isu pembuangan limbah nuklir Fukushima. Di beberapa kesempatan, Menteri Luar Negeri juga secara langsung menemui Menteri Luar Negeri Tiongkok untuk mendiskusikan kebijakan larangan impor produk laut tersebut.

Pada strategi *bringing in non-state actors*, Jepang mengandeng perusahaan swasta TEPCO dan Foodison Inc untuk membantu Jepang memperkuat posisinya dalam proses negosiasi. TEPCO berperan menyajikan data-data keamanan mengenai limbah nuklir Fukushima sehingga Jepang dapat meyakinkan Tiongkok bahwa limbah nuklir tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Selanjutnya pada strategi ketiga *greater transparency*, Jepang sangat terbuka kepada masyarakat mengenai keamanan limbah nuklir Fukushima. Jepang bersama IAEA mempublikasikan data zat radioaktif yang terkandung dalam limbah nuklir tersebut serta memberikan bukti bahwa air limbah nuklir tersebut masih berada dibawah batas aman ketentuan *World Trade Organization* (WTO). Pada strategi terakhir yaitu *using institutions*, Jepang memanfaatkan Departemen Kementerian dalam Negeri untuk membantu proses diplomasi ekonomi dengan Tiongkok. Selanjutnya, Jepang juga mengandeng institusi internasional yaitu IAEA sebagai badan pengawas pembuangan limbah nuklir Fukushima. Keterlibatan IAEA ini memberikan kekuatan dalam diplomasi ekonomi Jepang untuk meyakinkan Tiongkok bahwa Jepang tidak melakukan pelanggaran apapun seperti apa yang dituduhkan oleh Tiongkok.

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Jepang telah mengimplikasikan 4 strategi diplomasi ekonomi menurut Bayne dan Woolcook untuk menyelesaikan konflik larangan impor produk lautnya dengan Tiongkok. Rangkaian strategi yang diupayakan oleh Jepang membuat Jepang kembali dapat

memasuki pasar Tiongkok. Hal ini dibuktikan, sejak 2 tahun kebijakan larangan ini dikeluarkan oleh Tiongkok, pada 30 Mei 2025, Tiongkok telah menyetujui untuk melanjutkan impor produk laut Jepang. Kedua negara masih dalam proses mendiskusikan mengenai regulasi terkait dimulai kembalinya impor produk laut tersebut. Meskipun saat ini belum ada kembali transaksi produk laut antara keduanya, namun dengan telah dicapainya kesepakatan memulai kembali ekspor produk laut ini membuktikan bahwa Jepang berhasil menjalankan strategi diplomasi ekonominya untuk menanggapi hambatan dalam perekonomian negaranya.

### 5.1 Saran

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Jepang untuk menghadapi kebijakan larangan impor produk laut Tiongkok dalam penelitian ini dilihat dari diplomasi ekonomi. Penelitian ini menganalisis strategi-strategi diplomasi ekonomi Jepang dalam menghadapi kebijakan larangan impor produk laut oleh Tiongkok menggunakan konsep diplomasi ekonomi oleh Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock. Terdapat empat strategi diplomasi ekonomi yang dirumuskan oleh Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock yaitu *involving ministers*, *bringing in non-state actors*, *greater transparency* dan *using institutions*. Namun peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih bisa dikaji lebih lanjut. Saran yang bisa diterapkan untuk pembahasan penelitian ini selanjutnya adalah dengan menganalisis strategi-strategi diplomasi ekonomi Jepang menggunakan kerangka konsep dari ahli yang berbeda atau mengkaji topik ini melalui perspektif yang berbeda misalnya melalui perspektif diplomasi publik atau melihat kepentingan Tiongkok mengeluarkan

kebijakan larangan impor produk laut sehingga ditemukan temuan baru dari topik penelitian ini.

